



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR: 21 TAHUN 2023  
TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023.
- KESATU : Meneta.pkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2023 sebagairnana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
pada tanggal : 09 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,

  
DEDY TRIYADI

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
I	Manajemen Perubahan	1. Perencanaan Reformasi Birokrasi	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung. Tim terdiri dari: 1. Tim Pengarah; 2. Tim Pelaksana (8 Area Perubahan); 3. Tim Agen Perubahan 4. Tim Assessor	SK Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Unit/Satuan Kerja	√													Terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor: 26 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2023			
			Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	Maklumat dan pembacaan deklarasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung.		√															
			Membuat forum Focus Group Discussion (FGD) dalam Penyusunan Rencana Aksi Tahunan RB dan Rencana Aksi Agen perubahan di lingkungan Sekretariat Kota Bandar Lampung	Tersusunya daftar inventarisasi masalah yang timbul di lingkungan Unit Kerja KPU Kota Bandar Lampung, serta menghasilkan solusi sebagai langkah/strategi antisipasi kedepannya	√	√	√														
		2. Pelaksanaan manajemen perubahan	1. Melakukan sosialisasi internal kegiatan reformasi Reformasi Birokrasi melalui pemasangan slogan dan budaya kerja pada tempat strategis di kantor serta pada setiap ruang pegawai	1. Meningkatnya kesadaran pegawai terhadap kegiatan kantor, responsif terhadap kegiatan kantor, bertanggungjawab atas pembagian tugas oleh atasan serta terlibat aktif dalam progres pelaksanaan kegiatan kantor; 2. Pembangunan kolom Reformasi Birokrasi Unit/Satuan Kerja di website resmi yang berisikan dokumentasi/pelaporan pelaksanaan RB di lingkungan KPU Kota Bandar Lampung			√	√													
			2. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	1. Bedah regulasi tentang kode etik penyelenggara pemilu; 2. Pengawasan dan supervisi kode etik penyelenggara pemilu dan ASN;						√									√		
			3. Penyelenggaraan Integritas di lingkungan kerja KPU Kota Bandar Lampung:  - Penandatanganan Pakta integritas;  - Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap tahun;  - Pelaksanaan manajemen benturan kepentingan  - Pembangunan Zona Integritas	1. Terlaksananya penandatanganan Pakta Integritas baik Anggota dan ASN di lingkungan KPU Kota Bandar Lampung 2. Persentase (%) pelaporan LHKPN Anggota KPU Kota Bandar Lampung dan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung 3. Persentase (%) pelaporan LHKASN seluruh ASN KPU Kota Bandar Lampung 4. Dokumen Laporan penanganan benturan kepentingan berikut dokumentasi: a. Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan b. Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan c. Deklarasi Reformasi Birokrasi penancangan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan KPU Kota Bandar Lampung	√															√	Penandatanganan pakta integritas dilaksanakan secara serentak SE KPU Provinsi Lampung melalui link zoom pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 yang diikuti oleh seluruh KPU kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung
					√																





		<p>2. Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi ke sekretariat KPU Kota Bandar Lampung:</p> <p>a. Aplikasi tata naskah dinas</p> <p>b. Aplikasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg, SIAP, SAPK)</p> <p>c. Aplikasi Perencanaan (SAKTI)</p> <p>d. Aplikasi penganggaran (SAKTI)</p> <p>e. Aplikasi Keuangan (OmSpam, SAIBA, SAS, SILABI, SPRINT)</p> <p>f. Aplikasi Manajemen Kinerja</p> <p>g. Aplikasi Pengadaan (SIRUP, LPSE, Ecatalog))</p>	<p>1. Jumlah dan jenis Naskah Dinas yang sudah dimanfaatkan;</p> <p>2. Data pemanfaatan aplikasi Manajemen Kepegawaian</p> <p>3. Terisinya data aplikasi Manajemen Perencanaan</p> <p>4. Terisinya data aplikasi Penganggaran</p> <p>5. Terisinya data aplikasi Manajemen Keuangan</p> <p>6. Terisinya aplikasi manajemen kinerja</p> <p>7. % Pengadaan melalui aplikasi pengadaan</p>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
		<p>3. Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan publik:</p> <p>a. Layanan pengaduan Publik</p> <p>b. Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p> <p>c. Layanan <i>Whistle Blowing System (WBS)</i></p> <p>d. Layanan Kepemiluan</p> <p>e. Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)</p>	<p>1. Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oleh publik, SOP dan jumlah pencaadu/laboran; Aplikasi Dokumentasi Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja (JDIIH Sekretariat) yang selalu diperbaharui;</p> <p>3. Dapat diaksesnya <i>WBS</i> oleh stakeholder, SOP dan Jumlah pelapor/Laporan Pencajukan;</p> <p>4. Jumlah jumlah aplikasi Kepemiluan yang dimanfaatkan, serta:</p> <p>a. Data pencajukan bagi aplikasi yang bisa diakses publik</p> <p>b. Indeks Survei Kepuasan Publik terhadap aplikasi</p> <p>5. Jumlah pemohon melalui aplikasi PPID Satuan kerja oleh publik.</p>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
		<p>4. Penerapan sistem kearsipan yang handal</p> <p>1. Penerapan sistem arsip</p> <p>2. Kerjasama dengan arsip daerah</p>	<p>1. Terkelolanya arsip statis, dinamis, manual dan digital di KPU Kota Bandar Lampung;</p> <p>2. Terkelolanya arsip statis dan dinamis di KPU Kota Bandar</p> <p>3. Terdokumentasinya arsip vital</p>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
V	Penguatan Sistem Manajemen	<p>1. Pembangunan Sistem Merit</p> <p>1. Penerapan Pengukuran Kinerja Individu</p>	<p>1. Seluruh pegawai memiliki Sasaran Kinerja Pegawai</p> <p>2. Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (Target output/mutu/waktu/biaya)</p> <p>3. Sasaran Kinerja Pegawai mendukung Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja secara berjenjang/ Cascading</p> <p>4. Pengukuran periodik Sasaran kinerja Individu</p> <p>5. Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP</p> <p>6. Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment</p>	√	√	√													
		<p>2. Penerapan <i>assessment</i> untuk pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai</p>	<p>1. Data Mutasi</p> <p>2. Data Promosi</p> <p>3. Data Peserta Assessment</p>	√	√													Pelaksanaan assesment menjadi kewenangan KPU Provinsi	
		<p>3. Penerapan disiplin dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu</p>	<p>1. Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya</p> <p>2. Jumlah Pelanggaran tahun ini</p> <p>3. Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi/hukuman</p>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		<p>4. Perencanaan kebutuhan/ penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN menggunakan Analisa Beban Kerja (ABK)</p>	<p>Tersedianya dokumen Analisis Beban Kerja</p>	√															
		<p>5. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi</p>	<p>1. Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di KPU Kota Bandar Lampung</p>																

			2. Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	√																		
		6. Implementasi Standar Kompetensi Jabatan	Setiap Jabatan sudah memiliki Standar Kompetensi Jabatan																		Standar kompetensi jabatan di susun oleh KPU RI	
		7. Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian	Data kepegawaian yang mutakhir di KPU Kota Bandar Lampung							√											Tentaif, sesuai kebijakan yang di tetapkan oleh KPU RI	
	2. Profesionalisme ASN	Pembangunan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung unit dan satuan kerja			√																
VI	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Penyusunan dan penetapan Renstra Satuan Kerja 2. Reviu Renstra satuan Kerja 3. Penetapan Kinerja dengan menerapkan <i>reward and punishment</i>	Renstra satuan kerja Renstra hasil reviu	√																Reviu Renstra Tahun 2020-2024 telah dilaksanakan pada tanggal 22-24 Desember 2021 oleh KPU RI Surat Tugas Nomor 232/RT.02.1/01/2021	
		4. Penyelenggaraan anqqaran yang efektif dan efisien	1. Adanya dokumen penetapan Kinerja hingga level Eselon IV 2. % Capaian kinerja merupakan unsur pemberian <i>Reward &amp; Punishmet</i> 3. Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai	1. Adanya Proqram dan kegiatan: a. Jumlah proqram b. Jumlah kegiatan c. Jumlah program yang mendukung tercapainya kinerja utma oraanisasi d. Jumlah kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utma oraanisasi 2. Persentase sasaran Kinerja: a. Jumlah Sasaran Kinerja b. Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih c. Persentase Anggaran yang berhasil difocusing untuk mendukung tercapainya kinerja utama oraanisasi: 1. Jumlah anqqaran total 2. Jumlah anggaran yang berhasil difocusing	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		4. Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran;	Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
		5. Pengukuran Capaian Kinerja Unit/Satuan Kerja	% Capaian kinerja unit/satuan kerja																		√	√



		4. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem pengendalian gratifikasi	1. Laporan pengendalian gratifikasi 2. Tindak lanjut Pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	3. Pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> KPU	1. Pembangunan aplikasi <i>Whistle Blowing System</i> di Lingkungan Unit/Satuan Kerja 2. Pengelolaan WBS di lingkungan Unit/Satuan Kerja 3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan WBS di lingkungan Unit/Satuan Kerja	1. Tersedianya aplikasi WBS yang bisa diakses oleh publik 2. Adanya SOP WBS 3. Adanya Pengelola WBS Prosentase Pengaduan WBS selesai ditindaklanjuti Laporan pengelolaan WBS di lingkungan unit/satuan kerja.		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	4. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU	1. Identifikasi Benturan Kepentingan di lingkungan Unit/Satuan Kerja. 2. Penandatanganan Surat Pernyataan Benturan Kepentingan bagi Anggota dan ASN yang memiliki potensi di lingkungan Unit/Satuan Kerja 3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut atas Pengelolaan Benturan Kepentingan.	Potensi-potensi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan unit/satuan kerja. % Penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan dari identifikasi benturan kepentingan;  Dokumen laporan monitoring, evaluasi pengelolaan Benturan Kepentingan.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	5. Peningkatan SPIP di KPU Kota Bandar Lampung	1. Pembangunan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) di KPU Kota Bandar Lampung 2. Pelaksanaan SPIP: a. Lingkungan pengendalian b. Penilaian risiko c. Kegiatan pengendalian d. Informasi dan komunikasi e. Pemantauan pengendalian intern 1. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan SPIP.	Adanya tim SPIP pada satuan kerja  Terselenggaranya: 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan pengendalian intern Pelaporan Buku Kendali tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	6. Penanganan pengaduan masyarakat KPU	1. Pembangunan Sistem Pengaduan masyarakat di Lingkungan Unit/Satuan kerja 2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Unit/Satuan kerja: 3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Unit/Satuan kerja	1. Tersedianya sarana penyampaian pengaduan, 2. Adanya pejabat yang mengelola pengaduan; 3. Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan; 4. Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan; Prosentase Pengaduan Masyarakat selesai ditindaklanjuti  1. laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian, hambatan dan rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	7. Peningkatan Integritas	1. Penyampaian LHKPN 2. Penyampaian LHKASN	100% seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan Unit/Satuan 100% LHKASN di KPU Kota Bandar Lampung	√	√	√										
	8. Peningkatan Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa	1. Pembangunan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 2. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa 3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan atas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Adanya struktur pengelola Pengadaan Barang/jasa di KPU Kota Bandar Lampung;  Prosentase pelaksanaan pengadaan sesuai perpres 16 Tahun 2018 Laporan pengadaan barang/jasa				√	√	√	√	√	√	√	√	√	ULP pengadaan barang di kordinir oleh KPU Provinsi
VIII	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Penguatan pelayanan prima di KPU Kota Bandar Lampung	Memetakan jenis-jenis/ produk-produk pelayanan Administrasi Internal Kesekretariatan dan pelayanan eksternal (terkait Kepemiluan)									√	√			Komponen standar kegiatan yang di lakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung



		6. Pengelolaan Penqaduan a. Ketersediaan sarana penqaduan b. Ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian aduan; c. Ketersediaan pejabat/petugas penqelola aduan; 7. Penilaian Kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan lanqanan dan survei pelayanan 8. Visi, Misi dan Motto Pelayanan: a. Ketersediaan visi dan misi pelayanan b. Ketersediaan moto pelayanan 9. Atribut Pelayanan: a. berupa kartu identitas petugas; b. Kartu tamu; c. Buku tamu; d. Petunjuk arah ruang layanan																						
	4. Penerapan partisipasi publik dalam pelayanan publik;	1. Pembangunan Kerja Sama 2. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu																			√	√	√	√
	5. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;	Pembangunan dan pelaksanaan reward dan punishment dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya pemberian reward dan punishment dalam pelayanan																					√

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kota Bandar Lampung  
 Kasubbag Hukum dan SDM,

  
 SEPTRIANINGSIH

Bandar Lampung, 9 Januari 2023  
 Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Kota Bandar Lampung

  
 DEDY TRIADI

